



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/455/Kept./403.013/2023

TENTANG

KRITERIA KONDISI KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN UNTUK SETIAP
UNIT/PERANGKAT DAERAH, JENIS JABATAN DAN KELAS JABATAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bupati Magetan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, diamanatkan bahwa kriteria kondisi kerja pegawai Aparatur Sipil Negara untuk setiap unit / perangkat daerah, jenis jabatan dan kelas jabatan ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kriteria Kondisi Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Untuk Setiap Unit/Perangkat Daerah, Jenis Jabatan Dan Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6477);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan

Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6264);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 123);
16. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 28);

17. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 28);
18. Peraturan Bupati Magetan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 19)
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 28);
22. Peraturan Bupati Magetan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Kriteria Kondisi Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Untuk Setiap Unit/Perangkat Daerah, Jenis Jabatan Dan Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/148/Kept/403.013/2023 tentang Kriteria Kondisi Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Untuk Setiap Unit/Perangkat Daerah, Jenis Jabatan Dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 27 Desember 2023

Pj. BUPATI MAGETAN,

TTD

HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR :188/455/Kept/403.013/2023

TANGGAL : 27 Desember 2023

KRITERIA KONDISI KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN UNTUK SETIAP UNIT KERJA/PERANGKAT DAERAH, JENIS JABATAN DAN KELAS JABATAN

NO	PERANGKAT DAERAH DENGAN RESIKO KERJA	NAMA JABATAN	UNIT KERJA ESELON II	UNIT KERJA ESELON III	UNIT KERJA ESELON IV	JENIS JABATAN	KELAS	KETERANGAN
1	SEKRETARIAT DAERAH	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		Jabatan Administrator	12	Mengelola Pengadaan Barang dan Jasa
		Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Ahli Madya	Sekretariat Daerah	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		Jabatan Fungsional	12	Mengelola Pengadaan Barang dan Jasa
		Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Ahli Muda	Sekretariat Daerah	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		Jabatan Fungsional	10	Mengelola Pengadaan Barang dan Jasa
		Analisis Kebijakan Ahli Muda	Sekretariat Daerah	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		Jabatan Fungsional	10	Mengelola Pengadaan Barang dan Jasa
		Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		Jabatan Pelaksana	7	Mengelola Pengadaan Barang dan Jasa

NO	PERANGKAT DAERAH DENGAN RESIKO KERJA	NAMA JABATAN	UNIT KERJA ESELON II	UNIT KERJA ESELON III	UNIT KERJA ESELON IV	JENIS JABATAN	KELAS	KETERANGAN
		Analisis Advokasi Hukum	Sekretariat Daerah	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		Jabatan Pelaksana	7	Mengelola Pengadaan Barang dan Jasa
		Pengadministrasi Umum	Sekretariat Daerah	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		Jabatan Pelaksana	5	Mengelola Pengadaan Barang dan Jasa
		Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		Jabatan Pelaksana	7	Mengelola Pengadaan Barang dan Jasa
		Pranata Barang Dan Jasa	Sekretariat Daerah	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		Jabatan Pelaksana	6	Mengelola Pengadaan Barang dan Jasa
		Pengelola Data	Sekretariat Daerah	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		Jabatan Pelaksana	6	Mengelola Pengadaan Barang dan Jasa
		Analisis Data dan Informasi	Sekretariat Daerah	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		Jabatan Pelaksana	7	Mengelola Pengadaan Barang dan Jasa
		Pengelola Teknologi Informasi	Sekretariat Daerah	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		Jabatan Pelaksana	6	Mengelola Pengadaan Barang dan Jasa
		Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sekretariat Daerah	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		Jabatan Pelaksana	5	Mengelola Pengadaan Barang dan Jasa

NO	PERANGKAT DAERAH DENGAN RESIKO KERJA	NAMA JABATAN	UNIT KERJA ESELON II	UNIT KERJA ESELON III	UNIT KERJA ESELON IV	JENIS JABATAN	KELAS	KETERANGAN
2	INSPEKTORAT	Inspektur	Inspektorat	Inspektorat		Jabatan Pimpinan Tinggi	14	Berisiko terhadap aparat pemeriksa dan penegak hukum
		Sekretaris Inspektorat	Inspektorat	Sekretariat Inspektorat		Jabatan Administrator	12	Berisiko terhadap aparat pemeriksa dan penegak hukum
		Inspektur Pembantu I	Inspektorat	Inspektur Pembantu I		Jabatan Administrator	11	Berisiko terhadap aparat pemeriksa dan penegak hukum
		Inspektur Pembantu II	Inspektorat	Inspektur Pembantu II		Jabatan Administrator	11	Berisiko terhadap aparat pemeriksa dan penegak hukum
		Inspektur Pembantu III	Inspektorat	Inspektur Pembantu III		Jabatan Administrator	11	Berisiko terhadap aparat pemeriksa dan penegak hukum
		Inspektur Pembantu IV	Inspektorat	Inspektur Pembantu IV		Jabatan Administrator	11	Berisiko terhadap aparat pemeriksa dan

NO	PERANGKAT DAERAH DENGAN RESIKO KERJA	NAMA JABATAN	UNIT KERJA ESELON II	UNIT KERJA ESELON III	UNIT KERJA ESELON IV	JENIS JABATAN	KELAS	KETERANGAN
								penegak hukum
		Inspektur Pembantu Investigasi	Inspektorat	Inspektur Pembantu Investigasi		Jabatan Administrator	11	Berisiko terhadap aparat pemeriksa dan penegak hukum
		JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Ahli Madya	Inspektorat	Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III, Inspektur Pembantu IV, Inspektur Pembantu Investigasi		Jabatan Fungsional	11	Berisiko terhadap aparat pemeriksa dan penegak hukum
		JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Ahli Muda	Inspektorat	Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III, Inspektur Pembantu IV, Inspektur Pembantu Investigasi		Jabatan Fungsional	9	Berisiko terhadap aparat pemeriksa dan penegak hukum
		JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan	Inspektorat	Inspektur Pembantu I, Inspektur		Jabatan Fungsional	8	Berisiko terhadap aparat

NO	PERANGKAT DAERAH DENGAN RESIKO KERJA	NAMA JABATAN	UNIT KERJA ESELON II	UNIT KERJA ESELON III	UNIT KERJA ESELON IV	JENIS JABATAN	KELAS	KETERANGAN
		Pemerintahan di Daerah Ahli Pertama		Pembantu II, Inspektur Pembantu III, Inspektur Pembantu IV, Inspektur Pembantu Investigasi				pemeriksa dan penegak hukum
		JF Auditor Ahli Madya	Inspektorat	Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III, Inspektur Pembantu IV, Inspektur Pembantu Investigasi		Jabatan Fungsional	11	Berisiko terhadap aparat pemeriksa dan penegak hukum
		JF Auditor Ahli Muda	Inspektorat	Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III, Inspektur Pembantu IV, Inspektur Pembantu Investigasi		Jabatan Fungsional	9	Berisiko terhadap aparat pemeriksa dan penegak hukum
		JF Auditor Ahli Pertama	Inspektorat	Inspektur Pembantu I, Inspektur		Jabatan Fungsional	8	Berisiko terhadap aparat

NO	PERANGKAT DAERAH DENGAN RESIKO KERJA	NAMA JABATAN	UNIT KERJA ESELON II	UNIT KERJA ESELON III	UNIT KERJA ESELON IV	JENIS JABATAN	KELAS	KETERANGAN
				Pembantu II, Inspektur Pembantu III, Inspektur Pembantu IV, Inspektur Pembantu Investigasi				pemeriksa dan penegak hukum
3	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran			Jabatan Pimpinan Tinggi	14	Keselamatan Kerja
		Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		Jabatan Administrator	12	Keselamatan Kerja
		Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah		Jabatan Administrator	11	Keselamatan Kerja
		Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat		Jabatan Administrator	11	Keselamatan Kerja
		Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Bidang Perlindungan Masyarakat		Jabatan Administrator	11	Keselamatan Kerja
		Kepala Bidang Pemadam Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam	Bidang Pemadam Kebakaran		Jabatan Administrator	11	Keselamatan Kerja

NO	PERANGKAT DAERAH DENGAN RESIKO KERJA	NAMA JABATAN	UNIT KERJA ESELON II	UNIT KERJA ESELON III	UNIT KERJA ESELON IV	JENIS JABATAN	KELAS	KETERANGAN
			Kebakaran					
		Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan Dan Penyuluhan	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah	Seksi Pembinaan, Pengawasan Dan Penyuluhan	Jabatan Pengawas	9	Keselamatan Kerja
		Kepala Seksi Penyelidikan Dan Penyidikan	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah	Seksi Penyelidikan Dan Penyidikan	Jabatan Pengawas	9	Keselamatan Kerja
		Kepala Seksi Operasi Dan Pengendalian	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	Seksi Operasi Dan Pengendalian	Jabatan Pengawas	9	Keselamatan Kerja
		Kepala Seksi Pengamanan Dan Pengawalan	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	Seksi Pengamanan Dan Pengawalan	Jabatan Pengawas	9	Keselamatan Kerja
		Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat Dan Kerjasama	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Bidang Perlindungan Masyarakat	Seksi Perlindungan Masyarakat Dan Kerjasama	Jabatan Pengawas	9	Keselamatan Kerja
		Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Bidang Perlindungan Masyarakat	Seksi Bina Potensi Masyarakat	Jabatan Pengawas	9	Keselamatan Kerja
		Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Bidang Pemadam Kebakaran	Seksi Penanggulangan Kebakaran	Jabatan Pengawas	9	Keselamatan Kerja
		Kepala Seksi Pencegahan Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam	Bidang Pemadam Kebakaran	Seksi Pencegahan Kebakaran	Jabatan Pengawas	9	Keselamatan Kerja

NO	PERANGKAT DAERAH DENGAN RESIKO KERJA	NAMA JABATAN	UNIT KERJA ESELON II	UNIT KERJA ESELON III	UNIT KERJA ESELON IV	JENIS JABATAN	KELAS	KETERANGAN
			Kebakaran					
		Pranata Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah	Seksi Pembinaan, Pengawasan Dan Penyuluhan	Jabatan Pelaksana	5	Keselamatan Kerja
		Pengelola Pelanggaran Peraturan Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah	Seksi Pembinaan, Pengawasan Dan Penyuluhan	Jabatan Pelaksana	6	Keselamatan Kerja
		Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah	Seksi Pembinaan, Pengawasan Dan Penyuluhan	Jabatan Pelaksana	7	Keselamatan Kerja
		Pengadministrasi Hukum	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah	Seksi Pembinaan, Pengawasan Dan Penyuluhan	Jabatan Pelaksana	5	Keselamatan Kerja
		Analisis Hukum	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah	Seksi Pembinaan, Pengawasan Dan Penyuluhan	Jabatan Pelaksana	7	Keselamatan Kerja
		Penyidik	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah	Seksi Penyelidikan Dan Penyidikan	Jabatan Pelaksana	7	Keselamatan Kerja
		Pengolah Data Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah	Seksi Penyelidikan Dan Penyidikan	Jabatan Pelaksana	6	Keselamatan Kerja
		Pemeriksa Intelijen	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam	Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah	Seksi Penyelidikan Dan Penyidikan	Jabatan Pelaksana	7	Keselamatan Kerja

NO	PERANGKAT DAERAH DENGAN RESIKO KERJA	NAMA JABATAN	UNIT KERJA ESELON II	UNIT KERJA ESELON III	UNIT KERJA ESELON IV	JENIS JABATAN	KELAS	KETERANGAN
			Kebakaran					
		Pengolah Data Barang Hasil Penindakan	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	Seksi Operasi Dan Pengendalian	Jabatan Pelaksana	6	Keselamatan Kerja
		Pranata Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	Seksi Operasi Dan Pengendalian	Jabatan Pelaksana	5	Keselamatan Kerja
		Petugas Keamanan	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	Seksi Operasi Dan Pengendalian	Jabatan Pelaksana	3	Keselamatan Kerja
		Pengelola Ketertiban	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	Seksi Operasi Dan Pengendalian	Jabatan Pelaksana	6	Keselamatan Kerja
		Analisis Pengendalian Krisis	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	Seksi Operasi Dan Pengendalian	Jabatan Pelaksana	7	Keselamatan Kerja
		Pranata Pasukan Pengamanan Dalam	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	Seksi Pengamanan Dan Pengawalan	Jabatan Pelaksana	5	Keselamatan Kerja
		Petugas Keamanan	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	Seksi Pengamanan Dan Pengawalan	Jabatan Pelaksana	3	Keselamatan Kerja
		Pengelola Keamanan dan Ketertiban	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam	Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman	Seksi Pengamanan Dan Pengawalan	Jabatan Pelaksana	6	Keselamatan Kerja

NO	PERANGKAT DAERAH DENGAN RESIKO KERJA	NAMA JABATAN	UNIT KERJA ESELON II	UNIT KERJA ESELON III	UNIT KERJA ESELON IV	JENIS JABATAN	KELAS	KETERANGAN
			Kebakaran	Masyarakat				
		Pranata Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	Seksi Pengamanan Dan Pengawalan	Jabatan Pelaksana	5	Keselamatan Kerja
		Penata Teknis Pengamanan	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	Seksi Pengamanan Dan Pengawalan	Jabatan Pelaksana	7	Keselamatan Kerja
		Pengelola Pelaksanaan Program Kelembagaan dan Kerjasama	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Bidang Perlindungan Masyarakat	Seksi Perlindungan Masyarakat Dan Kerjasama	Jabatan Pelaksana	6	Keselamatan Kerja
		Analisis Data dan Kerjasama Pemasyarakatan	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Bidang Perlindungan Masyarakat	Seksi Perlindungan Masyarakat Dan Kerjasama	Jabatan Pelaksana	7	Keselamatan Kerja
		Analisis Pemberdayaan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Bidang Perlindungan Masyarakat	Seksi Bina Potensi Masyarakat	Jabatan Pelaksana	7	Keselamatan Kerja
		Penyuluh Keamanan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Bidang Perlindungan Masyarakat	Seksi Bina Potensi Masyarakat	Jabatan Pelaksana	7	Keselamatan Kerja
		Pranata Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Bidang Perlindungan Masyarakat	Seksi Bina Potensi Masyarakat	Jabatan Pelaksana	5	Keselamatan Kerja
		Petugas Keamanan	Satuan Polisi Pamong Praja	Bidang Pemadam Kebakaran	Seksi Penanggulangan	Jabatan Pelaksana	3	Keselamatan Kerja

NO	PERANGKAT DAERAH DENGAN RESIKO KERJA	NAMA JABATAN	UNIT KERJA ESELON II	UNIT KERJA ESELON III	UNIT KERJA ESELON IV	JENIS JABATAN	KELAS	KETERANGAN
			dan Pemadam Kebakaran		Kebakaran			
		Pranata Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Bidang Pemadam Kebakaran	Seksi Penanggulangan Kebakaran	Jabatan Pelaksana	5	Keselamatan Kerja
		Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Bidang Pemadam Kebakaran	Seksi Penanggulangan Kebakaran	Jabatan Pelaksana	5	Keselamatan Kerja
		Analisis Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Bidang Pemadam Kebakaran	Seksi Penanggulangan Kebakaran	Jabatan Pelaksana	7	Keselamatan Kerja
		Penyuluh Bencana	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Bidang Pemadam Kebakaran	Seksi Pencegahan Kebakaran	Jabatan Pelaksana	7	Keselamatan Kerja
		Analisis Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Bidang Pemadam Kebakaran	Seksi Pencegahan Kebakaran	Jabatan Pelaksana	7	Keselamatan Kerja
		Pengelola Data Dampak Bencana	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Bidang Pemadam Kebakaran	Seksi Pencegahan Kebakaran	Jabatan Pelaksana	6	Keselamatan Kerja
		Pemadam Kebakaran Pemula	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran			Jabatan Fungsional	5	Keselamatan Kerja
4	DINAS PERHUBUNGAN	Kepala Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan		Jabatan Pimpinan	14	Keselamatan Kerja

NO	PERANGKAT DAERAH DENGAN RESIKO KERJA	NAMA JABATAN	UNIT KERJA ESELON II	UNIT KERJA ESELON III	UNIT KERJA ESELON IV	JENIS JABATAN	KELAS	KETERANGAN
						Tinggi		
		Sekretaris Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	Sekretariat Dinas Perhubungan		Jabatan Administrator	12	Keselamatan Kerja
		Kepala Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan	Dinas Perhubungan	Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan		Jabatan Administrator	11	Keselamatan Kerja
		Kepala Bidang Prasarana	Dinas Perhubungan	Bidang Prasarana		Jabatan Administrator	11	Keselamatan Kerja
		Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Dinas Perhubungan	Bidang Pengembangan dan Keselamatan		Jabatan Administrator	11	Keselamatan Kerja
		Kepala Seksi Lalu Lintas	Dinas Perhubungan	Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan		Jabatan Pengawas	9	Keselamatan Kerja
		Kepala Seksi Angkutan	Dinas Perhubungan	Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan		Jabatan Pengawas	9	Keselamatan Kerja
		Kepala Seksi Perencanaan, Pembangunan Dan Pengoperasian Prasarana	Dinas Perhubungan	Bidang Prasarana		Jabatan Pengawas	9	Keselamatan Kerja
		Kepala Seksi Perawatan Prasarana	Dinas Perhubungan	Bidang Prasarana		Jabatan Pengawas	9	Keselamatan Kerja
		Kepala Seksi Pemanduan Moda, Teknologi Dan Lingkungan Perhubungan	Dinas Perhubungan	Bidang Pengembangan dan Keselamatan		Jabatan Pengawas	9	Keselamatan Kerja
		Kepala Seksi Keselamatan	Dinas Perhubungan	Bidang Pengembangan dan Keselamatan		Jabatan Pengawas	9	Keselamatan Kerja

NO	PERANGKAT DAERAH DENGAN RESIKO KERJA	NAMA JABATAN	UNIT KERJA ESELON II	UNIT KERJA ESELON III	UNIT KERJA ESELON IV	JENIS JABATAN	KELAS	KETERANGAN
		Kepala Seksi Pengujian Sarana	Dinas Perhubungan	Bidang Pengembangan dan Keselamatan		Jabatan Pengawas	9	Keselamatan Kerja
		Penyusun Rekayasa Lalu Lintas	Dinas Perhubungan	Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan	Seksi Lalu Lintas	Jabatan Pelaksana	7	Keselamatan Kerja
		Pengelola rekayasa lalu lintas	Dinas Perhubungan	Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan	Seksi Lalu Lintas	Jabatan Pelaksana	6	Keselamatan Kerja
		Pengawas Lalu Lintas Darat	Dinas Perhubungan	Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan	Seksi Lalu Lintas	Jabatan Pelaksana	7	Keselamatan Kerja
		Pengelola Pengawasan LLAJ	Dinas Perhubungan	Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan	Seksi Lalu Lintas	Jabatan Pelaksana	6	Keselamatan Kerja
		Pengelola Perparkiran	Dinas Perhubungan	Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan	Seksi Lalu Lintas	Jabatan Pelaksana	6	Keselamatan Kerja
		Pengadministrasi LLAJ	Dinas Perhubungan	Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan	Seksi Lalu Lintas	Jabatan Pelaksana	5	Keselamatan Kerja
		Juru Pungut Retribusi	Dinas Perhubungan	Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan	Seksi Lalu Lintas	Jabatan Pelaksana	3	Keselamatan Kerja
		Pengatur Lalu Lintas Jalan	Dinas Perhubungan	Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan	Seksi Lalu Lintas	Jabatan Pelaksana	6	Keselamatan Kerja
		Pengelola Usaha Angkutan	Dinas Perhubungan	Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan	Seksi Angkutan	Jabatan Pelaksana	6	Keselamatan Kerja
		Pengadministrasi LLAJ	Dinas Perhubungan	Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan	Seksi Angkutan	Jabatan Pelaksana	5	Keselamatan Kerja
		Analisis Angkutan Darat	Dinas Perhubungan	Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan	Seksi Angkutan	Jabatan Pelaksana	7	Keselamatan Kerja
		Penyusun Kebutuhan Perlengkapan	Dinas Perhubungan	Bidang Prasarana	Seksi Perencanaan, Pembangunan	Jabatan Pelaksana	7	Keselamatan Kerja

NO	PERANGKAT DAERAH DENGAN RESIKO KERJA	NAMA JABATAN	UNIT KERJA ESELON II	UNIT KERJA ESELON III	UNIT KERJA ESELON IV	JENIS JABATAN	KELAS	KETERANGAN
		Jalan			Dan Pengoperasian Prasarana			
		Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Dinas Perhubungan	Bidang Prasarana	Seksi Perencanaan, Pembangunan Dan Pengoperasian Prasarana	Jabatan Pelaksana	5	Keselamatan Kerja
		Pengembang Sarana dan Prasarana	Dinas Perhubungan	Bidang Prasarana	Seksi Perencanaan, Pembangunan Dan Pengoperasian Prasarana	Jabatan Pelaksana	7	Keselamatan Kerja
		Pengawas angkutan dan terminal	Dinas Perhubungan	Bidang Prasarana	Seksi Perencanaan, Pembangunan Dan Pengoperasian Prasarana	Jabatan Pelaksana	7	Keselamatan Kerja
		Juru Pungut Retribusi	Dinas Perhubungan	Bidang Prasarana	Seksi Perencanaan, Pembangunan Dan Pengoperasian Prasarana	Jabatan Pelaksana	3	Keselamatan Kerja
		Operator Terminal	Dinas Perhubungan	Bidang Prasarana	Seksi Perencanaan, Pembangunan Dan Pengoperasian Prasarana	Jabatan Pelaksana	5	Keselamatan Kerja

NO	PERANGKAT DAERAH DENGAN RESIKO KERJA	NAMA JABATAN	UNIT KERJA ESELON II	UNIT KERJA ESELON III	UNIT KERJA ESELON IV	JENIS JABATAN	KELAS	KETERANGAN
		Pengelola Terminal	Dinas Perhubungan	Bidang Prasarana	Seksi Perencanaan, Pembangunan Dan Pengoperasian Prasarana	Jabatan Pelaksana	6	Keselamatan Kerja
		Pengawas Jaringan Utilitas	Dinas Perhubungan	Bidang Prasarana	Seksi Perawatan Prasarana	Jabatan Pelaksana	7	Keselamatan Kerja
		Pengelola Penerangan Jalan	Dinas Perhubungan	Bidang Prasarana	Seksi Perawatan Prasarana	Jabatan Pelaksana	6	Keselamatan Kerja
		Pemelihara Penerangan Jalan	Dinas Perhubungan	Bidang Prasarana	Seksi Perawatan Prasarana	Jabatan Pelaksana	5	Keselamatan Kerja
		Juru Mesin	Dinas Perhubungan	Bidang Prasarana	Seksi Perawatan Prasarana	Jabatan Pelaksana	5	Keselamatan Kerja
		Teknisi Listrik dan Jaringan	Dinas Perhubungan	Bidang Prasarana	Seksi Perawatan Prasarana	Jabatan Pelaksana	5	Keselamatan Kerja
		Pengelola Kelengkapan Jalan	Dinas Perhubungan	Bidang Prasarana	Seksi Perawatan Prasarana	Jabatan Pelaksana	6	Keselamatan Kerja
		Penelaah Dampak Lingkungan	Dinas Perhubungan	Bidang Prasarana	Seksi Pemanduan Moda, Teknologi Dan Lingkungan Perhubungan	Jabatan Pelaksana	7	Keselamatan Kerja
		Teknisi Listrik dan Jaringan	Dinas Perhubungan	Bidang Prasarana	Seksi Pemanduan Moda, Teknologi	Jabatan Pelaksana	5	Keselamatan Kerja

NO	PERANGKAT DAERAH DENGAN RESIKO KERJA	NAMA JABATAN	UNIT KERJA ESELON II	UNIT KERJA ESELON III	UNIT KERJA ESELON IV	JENIS JABATAN	KELAS	KETERANGAN
					Dan Lingkungan Perhubungan			
		Pengadministrasi LLAJ	Dinas Perhubungan	Bidang Prasarana	Seksi Pemanduan Moda, Teknologi Dan Lingkungan Perhubungan	Jabatan Pelaksana	5	Keselamatan Kerja
		Pengelola Rencana Tata Ruang dan Perhubungan	Dinas Perhubungan	Bidang Prasarana	Seksi Pemanduan Moda, Teknologi Dan Lingkungan Perhubungan	Jabatan Pelaksana	6	Keselamatan Kerja
		Pengelola Teknologi informasi	Dinas Perhubungan	Bidang Prasarana	Seksi Pemanduan Moda, Teknologi Dan Lingkungan Perhubungan	Jabatan Pelaksana	6	Keselamatan Kerja
		Penyusun Program Keselamatan Angkutan Jalan	Dinas Perhubungan	Bidang Prasarana	Seksi Keselamatan	Jabatan Pelaksana	7	Keselamatan Kerja
		Pengadministrasi LLAJ	Dinas Perhubungan	Bidang Prasarana	Seksi Keselamatan	Jabatan Pelaksana	5	Keselamatan Kerja
		Pengadministrasi Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	Bidang Prasarana	Seksi Pengujian Sarana	Jabatan Pelaksana	5	Keselamatan Kerja
		Juru Pungut Retribusi	Dinas Perhubungan	Bidang Prasarana	Seksi Pengujian Sarana	Jabatan Pelaksana	3	Keselamatan Kerja

NO	PERANGKAT DAERAH DENGAN RESIKO KERJA	NAMA JABATAN	UNIT KERJA ESELON II	UNIT KERJA ESELON III	UNIT KERJA ESELON IV	JENIS JABATAN	KELAS	KETERANGAN
		Pengawas Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	Bidang Prasarana	Seksi Pengujian Sarana	Jabatan Pelaksana	7	Keselamatan Kerja
		Pengelola Pengujian Kendaraan	Dinas Perhubungan	Bidang Prasarana	Seksi Pengujian Sarana	Jabatan Pelaksana	6	Keselamatan Kerja
		Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan		Jabatan Fungsional	8	Keselamatan Kerja
		Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan		Jabatan Fungsional	7	Keselamatan Kerja
		Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan		Jabatan Fungsional	6	Keselamatan Kerja
		Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan		Jabatan Fungsional	5	Keselamatan Kerja
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Jabatan Administrator	13	Keselamatan Kerja

NO	PERANGKAT DAERAH DENGAN RESIKO KERJA	NAMA JABATAN	UNIT KERJA ESELON II	UNIT KERJA ESELON III	UNIT KERJA ESELON IV	JENIS JABATAN	KELAS	KETERANGAN
		Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jabatan Pelaksana	9	Keselamatan Kerja
		Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Jabatan Pelaksana	9	Keselamatan Kerja
		Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jabatan Pelaksana	9	Keselamatan Kerja
		Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Seksi Kedaruratan dan Logistik	Jabatan Pelaksana	9	Keselamatan Kerja
		Pranata Bencana		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Jabatan Pelaksana	6	Keselamatan Kerja
		Penyuluh Bencana		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Jabatan Pelaksana	7	Keselamatan Kerja
		Pengadministrasi sarana dan prasarana		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Jabatan Pelaksana	5	Keselamatan Kerja
		Analisis Mitigasi Bencana		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jabatan Pelaksana	7	Keselamatan Kerja
		Analisis Peta Wilayah		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jabatan Pelaksana	7	Keselamatan Kerja

NO	PERANGKAT DAERAH DENGAN RESIKO KERJA	NAMA JABATAN	UNIT KERJA ESELON II	UNIT KERJA ESELON III	UNIT KERJA ESELON IV	JENIS JABATAN	KELAS	KETERANGAN
		Pemelihara Sarana Dan Prasarana		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Seksi Kedaruratan dan Logistik	Jabatan Pelaksana	5	Keselamatan Kerja
		Penyusun Rencana kebutuhan Logistik		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Seksi Kedaruratan dan Logistik	Jabatan Pelaksana	7	Keselamatan Kerja
		Teknisi Sarana dan Prasarana		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Seksi Kedaruratan dan Logistik	Jabatan Pelaksana	5	Keselamatan Kerja
		Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula		Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Jabatan Fungsional	6	Keselamatan Kerja

Pj. BUPATI MAGETAN,

TTD

HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

 SETDA
ARIEF RACHMAN, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014